

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial pada dua dasa warsa terakhir yang terjadi di sebagian besar negara berkembang, di berbagai belahan dunia, berlangsung begitu cepat dan tak dapat diperkirakan (*unpredictable*). Khusus di Indonesia, percepatan perubahan sosial tersebut terjadi hampir tak sebanding dengan percepatan perubahan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Begitu banyak ketimpangan sosial yang disebabkan oleh ketidakselarasan percepatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan terdapat banyak perusahaan domestik, apalagi perusahaan asing, sumber daya manusia pada tingkat manajemen puncaknya didominasi orang asing. Dan walaupun ada sumber daya manusia pribumi yang masuk di dalamnya dapat dicirikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan asing di luar negeri. Kenyataan ini paling tidak menunjukkan dua fakta menyakitkan. *Pertama*, bahwa mutu sumber daya manusia Indonesia untuk tingkat manajemen puncak masih kalah bersaing dengan mutu sumber daya asing. *Kedua*, bahwa sumber daya manusia output pendidikan dalam negeri tingkat kepercayaan penggunaannya masih lebih rendah dibanding output pendidikan luar negeri. Fakta kedua ini lebih jauh menunjukkan bahwa mutu sistem pendidikan Indonesia lebih rendah dari mutu pendidikan asing.

Kenyataan lainnya menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat tersebut telah menyeret berbagai lapisan dan tingkatan sosial masyarakat Indonesia pada keadaan serba sulit, serba tak menentu, dan serba tak pasti, ya, itu tadi

unpredictable. Penyelenggaraan pendidikan seperti tidak memiliki hubungan signifikan dengan dunia nyata kehidupan sosial dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja. Kesesuaian dan kelayakan sumber daya manusia menempati posisi formal hanya menjadi cita-cita dan harapan saja. *The right man on the right place* seperti impian yang jauh dari kenyataan. Intuisi primitif lebih banyak mewarnai tindakan sosial individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perubahan sosial yang melahirkan berbagai tuntutan dan tantangan penyesuaian baru membawa pula perubahan perilaku sosial masyarakat untuk berusaha memenuhinya dengan berbagai cara; cara yang baik, buruk, setengah baik dan setengah buruk; cara yang boleh dan tidak, atau antara yang boleh dan tidak boleh. Hasil selanjutnya, orang-orang yang tidak berhasil menjadi residu sosial yang sangat rentan dan signifikan pengaruhnya terhadap munculnya masalah-masalah sosial.

Dua ujung perubahan sosial yang selalu bersamaan adalah keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan membuahkan kemajuan sosial, sementara kegagalan membuahkan masalah sosial. Kedua-duanya sama-sama memiliki persoalan-persoalan lanjutan yang dibawanya. Kemajuan sosial menuntut kesiapan warga masyarakat untuk mengimbangi dan memenuhi tantangan dan tuntutan kemajuannya. Bukan perkara mustahil bila kemajuan sosial berlangsung lebih cepat melesat melewati kompetensi pranata sosial yang ada. Dan akibatnya masyarakat yang tertinggal oleh kemajuan yang dibawa perubahan sosial, menjadi masyarakat yang terpinggirkan. Ketidakmampuan mengimbangi tuntutan dan

tantangan kemajuan tersebut pada umumnya sering ditampakkan dengan wujud kesenjangan sosial, yang kemudian menjadi masalah sosial.

Masalah-masalah sosial yang muncul akibat perubahan sosial tersebut memiliki intensitas dan tingkat kesulitan penyelesaian yang berbeda-beda. Dan ini membawa implikasi pada pemilihan penanganan yang berbeda-beda pula. Masalah-masalah sosial kategori ringan cukup diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan yang lumrah dan umum dilakukan orang sebagai kegiatan sosial. Tetapi masalah-masalah sosial kategori berat tidak bisa diselesaikan hanya dengan sentuhan kegiatan sosial belaka, melainkan memerlukan pendekatan sosial secara profesional melalui metode pekerjaan sosial profesional. Penanganan masalah sosial secara profesional tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, memerlukan orang-orang profesional di bidangnya yang dididik dan dipersiapkan sebelumnya di lembaga pendidikan pekerja sosial.

Oleh karena itu, tidaklah keliru bila kemudian di Indonesia diselenggarakan pendidikan yang mencoba melahirkan pekerja-pekerja sosial profesional, mulai dari lembaga pendidikan pekerja sosial tingkat menengah melalui jalur pendidikan menengah kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial sampai tingkat tinggi melalui Jurusan Kesejahteraan Sosial di Perguruan Tinggi. Keberadaan lembaga pendidikan Pekerjaan Sosial sepantasnya menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan yang dibawa perubahan sosial karena darinya akan lahir pekerja sosial-pekerja sosial profesional yang akan menangani masalah-masalah sosial. Ya, paling tidak, juga bisa menjadi alternatif bagi

masyarakat untuk masuk sekolah kejuruan yang menjanjikan cukup luasnya peluang kerja karena begitu banyaknya garapan masalah sosial.

Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Sejak sepuluh tahun terakhir, padahal saat itu mulai diterapkannya kebijakan *Link and Match* melalui implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di seluruh SMK, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial ini rendah, terus menurun dari tahun ke tahun. Siswa baru selalu di bawah 'quota', baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlahnya selalu dibawah kapasitas sesungguhnya, dan mutunya pun rendah bila diukur dengan nilai perolehan siswa dalam surat keterangan hasil ujian (SKHU) di SMPnya. Setiap penerimaan siswa baru tidak pernah menetapkan *passing grade* karena memang tidak perlu *sortasi* dan selalu dengan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhinya.

Bahkan di beberapa SMK bidang keahlian Pekerjaan Sosial jumlah siswa pendaftar menunjukkan angka yang tidak memungkinkan lagi untuk dibuka bidang keahlian ini. Seperti di SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial Kabupaten Soe Nusa Tenggara Timur, sempat tidak membuka program keahlian Pekerjaan Sosial, beralih fungsi dengan membuka program keahlian Tata Busana. Di Malang Jawa Timur, SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial tertua di Indonesia pun, sudah lama membuka program keahlian Usaha Jasa Pariwisata untuk mengimbangi penurunan jumlah siswanya. Di DKI Jakarta, SMKN 28 yang selama ini membuka Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial dan selalu menjadi *benchmark* SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial lainnya, sudah dua tahun ini

membuka program keahlian Akomodasi Perhotelan. Di Lampung, SMKN 3 Terbanggi Besar tinggal menyisakan 66 siswa Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial untuk seluruh tingkatan kelas. Bahkan di SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung ini telah dibuka tiga program keahlian lain, Teknik Elektro (Instalasi Listrik), Teknik Elektronika (Audio Video), dan Tata Busana. Demikian pula di Jawa Barat, SMKN 15 Bandung sebagai SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial hasil alih fungsi dari Sekolah Guru Olahraga (SGO) mengalami persoalan *enrollment* serupa. Bahkan mulai tahun pelajaran 2006-2007 membuka Program Keahlian Akomodasi Perhotelan sebagai antisipasi menurunnya animo masyarakat terhadap bidang keahlian Pekerjaan Sosial. Dan ini tak jauh berbeda dengan SMK-SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial lainnya di Indonesia.

Akibat animo yang rendah itu, kualitas intelektual siswa pendaftar ke SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial pun rendah-rendah. Dengan kualitas awal seperti itu mengakibatkan proses pembelajaran siswa terasa berat bagi para guru. Dan hasilnya pun tak bisa diharapkan menggembirakan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya bagi para tamatan untuk bersaing, baik di dunia kerja maupun untuk melanjutkan sekolah. Walaupun sebenarnya untuk kondisi dunia kerja saat ini signifikansi keterkaitan latar belakang pendidikan dengan dunia kerja menunjukkan hal yang tidak bisa diukur dengan jelas dan pasti.

Sebagai informasi awal, gambaran daya serap lulusan SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial yang ada di Jawa Barat, yakni SMKN 15 Bandung yang sudah menerapkan PSG sejak 10 tahun lalu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1
KETERSERAPAN LULUSAN SMKN 15 BANDUNG DI DUNIA KERJA
Tahun 2000-2001 S/D 2004-2005

NO	TA-HUN	KETERSERAPAN				JUM LAH
		BEKERJA SESUAI KEAHLIAN	BEKERJA TIDAK SESUAI KEAHLIAN	MELANJUT KAN PENDIDIKAN	LAIN LAIN	
		%	%	%	%	
1	2001	17,82	35,65	6,94	25,69	100
2	2002	23,26	48,06	9,30	19,38	100
3	2003	21,69	43,37	10,84	24,10	100
4	2004	21,95	44,51	15,24	18,29	100
5	2005	21,51	43,60	17,44	17,44	100

Sumber: Rencana Induk Pengembangan dan Reengineering/ Renstra SMKN 15 2005

Demikian pula diperoleh gambaran daya serap lulusan SMK Negeri 28 DKI Jakarta sebagai berikut:

TABEL 2
PENYERAPAN LULUSAN SMKN 28 DKI JAKARTA
2002-2003 S/D 2004-2005

NO	Program Keahlian	Jumlah Tamatan	Bekerja						Bekm Bekerja	Mekan jutkan Ke PT	Tidak Dike-tahui	
			Sesuai			Tidak Sesuai						
			BU-MN	Swas ta	Wira-swasta	PNS	TNI POLRI	Swasta				Wira-swasta
1	Peksos 02/03	73		2				16	2	20	17	16
2	Peksos 03/04	101						30	2	30	15	24
3	Peksos 04/05	93						14	1	60	5	13
1	Akoper 03/04	71		26				6	2	5	29	3
2	Akoper 04/05	85		29				4	1	18	28	5

Sumber: Profil SMKN 28 DKI Jakarta 2005

Apa yang terpapar dalam Tabel 1 dan 2 diatas menunjukkan bahwa tujuan ideal sekolah kejuruan yakni lulusannya terserap di dunia kerja tidak tercapai dengan maksimal. Dunia kerja yang menyerap lulusan inipun belum menggambarkan tingkat kesesuaian dengan pendidikan pekerjaan sosial yang memadai. Lulusan yang melanjutkan sekolah pun jurusannya tidak semuanya

sesuai dengan latar belakang pekerjaan sosial. Gambaran ini menunjukkan terdapat persoalan yang perlu dijelaskan dan dicarikan solusinya.

Padahal diketahui bahwa konsep *Link and Match* dengan PSG-nya, secara pemahaman sederhana saja, adalah penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan dunia usaha / dunia industri (DU/DI) lebih intensif sehingga memungkinkan keterkaitan dan relevansi pendidikan dengan DU/DI. Itu artinya, sekolah dan DU/DI sejak awal sudah harus memiliki dan mencapai komitmen bersama untuk melahirkan lulusan-lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan pasar kerja sesungguhnya. Dengan pembelajaran melalui bekerja langsung di saat praktek kerja industri, sejatinya siswa diberi dua kesempatan sekaligus, ya belajar, ya bekerja. Melalui pengalaman belajar melalui bekerja langsung itulah sebenarnya diharapkan lulusan SMK memiliki bekal yang lebih lengkap. Minimalnya mereka siap bekerja dimanapun sesuai kompetensinya setelah lulus, dan maksimalnya mereka bisa berwirausaha secara mandiri dengan membuka lapangan kerja sendiri.

Tahun 2005 telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam tataran satuan pendidikan, PP 19/2005 ini mengatur delapan hal pokok yang distandarisasikan. Kedelapan standar itu adalah standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. PP 19/2005 ini mengharuskan setiap satuan pendidikan memenuhi standar penyelenggaraan yang memadai dalam delapan hal pokok yang diaturnya sehingga *output* dan *outcome* setiap satuan pendidikan di Indonesia memiliki jaminan mutu yang mumpuni.



... persoalan di atas memunculkan pertanyaan apakah ada yang kurang
... pendekatan PSG atau standar penyelenggaraan pendidikan yang belum
... oleh satuan pendidikan bidang keahlian Pekerjaan Sosial? Padahal sejak
... perencanaannya (Djojonegoro, 1998:6), program PSG telah dilakukan
pembabakan (*milestoning*); *lima tahun pertama* (Pelita VI) berupa *tahap
sosialisasi dan promosi* untuk membangun keberterimaan (*acceptability*) program
PSG, dan pada *lima tahun berikut* (Pelita VII) berupa *tahap pemantapan konsep
dan program* berdasarkan masukan dari pengalaman empirik, dan pada tahun
berikut *setelah sepuluh tahun baru terlaksana* sepenuhnya, sehingga *dapat
diandalkan* sebagai bagian integral program pengembangan sumberdaya manusia.
Dan saat ini implementasi PSG sudah masuk masa pasca pembabakan tersebut.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Sebab bila
kondisi ini dibiarkan terus menerus, tidak mustahil keadaannya akan semakin
parah. Tidak hanya sekedar rendahnya mutu lulusan dan daya serap dunia kerja,
melainkan bisa saja lebih dari itu, yakni sekolah sebagai lembaga pendidikan
kejuruan yang seharusnya menghasilkan tenaga terampil menjadi mandul dan
menghamburkan biaya saja, sekolah menghasilkan calon-calon penganggur dan
itu berarti meningkatkan angka pengangguran, yang berarti pula melahirkan
masalah sosial baru dan memperberat masalah-masalah sosial yang sudah ada.
Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian guna mengetahui
seberapa dalam kekurangan yang menjadi persoalan dan kelebihan yang dapat
dimantapkan, melalui suatu *Studi terhadap Implementasi Kebijakan Model
Pendidian Sistem Ganda (PSG) Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial di Indonesia*

dengan melakukan studi evaluatif terhadap implementasi PSG Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial di SMKN 15 Bandung Jawa Barat, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

B. Fokus Telaahan

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, menetapkan suatu kebijakan yang sangat populer terhadap Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu *'Link and Match'* atau keterkaitan dan kesepadanan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan tersebut adalah *'Dual System'* atau yang biasa dikenal dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang kini semakin disempurnakan dengan model Project Work dan atau Tugas Akhir untuk Uji Kompetensi siswanya dalam Praktek Kerja Industri (Prakerin). Operasionalisasinya adalah adanya kerja sama antara Sekolah dengan DU/DI dan Asosiasi Profesi melalui suatu wadah organisasi bernama Majelis Sekolah (MS) yang kini samar-samar terintegrasi dalam Komite Sekolah.

Pelaksanaan PSG di SMK diorientasikan agar kompetensi peserta didik betul-betul terkait dan sepadan dengan lapangan kerja bila nanti bekerja. Dengan demikian maka SMK sebagai produsen tenaga kerja akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten, terampil sesuai dengan kebutuhan DU/DI atau *demand_driven*. Sehingga paradigma lama, bahwa SMK hanya menjadi produsen/penghasil tenaga kerja (*supply_driven*) yang tidak mengindahkan apakah tenaga kerja (tamatan) yang dihasilkannya relevan atau tidak dengan kebutuhan lapangan kerja, dapat dihapuskan.



SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial dengan hanya satu Program Keahlian yaitu Pekerjaan Sosial, yang merupakan salah satu realitas kebijakan pemerintah yang sudah selama 10 tahun perjalanannya melaksanakan PSG, menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Padahal, kehadiran dan keberadaan para tamatan SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial sebagai *Asisten Pekerja Sosial* dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah cepat ini idealnya sangat dibutuhkan. Di tengah-tengah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia; seperti: kemiskinan, perubahan sosial, perubahan masyarakat, masalah integrasi sosial, pembangunan yang berorientasi pada keadilan, supremasi hukum yang harus ditegakan, hak azasi manusia, pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas lembaga-lembaga publik pada masyarakat, dan pemerataan distribusi sumber-sumber daya yang ada di masyarakat; seharusnya keberadaan dan kehadiran SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial beserta tamatannya ini dibutuhkan, karena masalah-masalah tersebut sangat relevan dengan kompetensi yang dipelajarinya.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, kehadiran dan keberadaan SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial ini belum mampu mencapai titik ideal yang diharapkan kebijakan pemerintah di atas. Sehingga penulis memandang perlu melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan penyelenggaraan SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial ini yang berfokus pada *Implementasi Kebijakan Model Pendidikan Sistem Ganda bidang keahlian Pekerjaan Sosial* dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

Studi ini difokuskan pada implementasi kebijakan model PSG di beberapa SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial yang tersebar di tiga propinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. SMK-SMK tersebut adalah SMKN 15 Bandung, SMKN 28 Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung. Ketiga SMK tersebut dipilih karena dipandang mewakili tiga kelompok strata kinerja sekolah, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Studi ini diarahkan pada upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut :

Pertanyaan umum:

Bagaimana implementasi kebijakan model PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial ditinjau dari standar nasional pendidikan sebagaimana diatur PP 19/2005?

Pertanyaan khusus:

- a. Bagaimanakah gambaran kongkrit *isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian* PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan model PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial?

C. Batasan Konsep-konsep Dasar

Untuk membatasi ruang lingkup disertasi ini, ditegaskan batasan konsep-konsep dasar yang merupakan konsep pokok yang dikaji dalam disertasi ini. Konsep-konsep dasar yang dipandang perlu untuk dibatasi secara operasional adalah:

1. Pendidikan Sistem Ganda

PSG yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk atau pola penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan tertentu di SMK yang diselenggarakan dengan melibatkan dunia kerja/industri secara aktif dalam program bersama dan terintegrasi untuk melatih kompetensi peserta didik yang relevan. Lebih khusus lagi bahwa PSG yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PSG dalam bidang keahlian Pekerjaan Sosial yang diselenggarakan di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung.

2. Isi Pendidikan

Isi pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik yang ada di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung.

3. Proses Pendidikan

Proses pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung, untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

4. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualifikasi kemampuan lulusan SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3

Terbanggi Besar Lampung yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan bidang keahlian pekerjaan sosial.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung, baik internal maupun eksternal.

6. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam penelitian ini, sarana itu meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana itu meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam hal ini sarana dan prasarana tersebut adalah yang ada di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung.

7. Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

sekolah yakni di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung.

8. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini adalah hal ihwal yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal pada tingkat satuan pendidikan yakni di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung yang berlaku selama setahun.

9. Penilaian Pendidikan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penilaian pendidikan adalah mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran bagaimana *implementasi Pendidikan Sistem Ganda bidang keahlian Pekerjaan Sosial* di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung berdasarkan standar nasional sesuai PP 19/2005. Berdasarkan temuan ini dikembangkan suatu alternatif model inovatif implementasi PSG bidang keahlian pekerjaan sosial masa depan yang nilai-nilai positifnya dapat ditransfer ke sekolah-sekolah sejenis di propinsi lainnya, jika dipandang memiliki transferabilitas yang layak.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran kongkrit *isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian* PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial.
- b. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan model PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial.
- c. Mengkritisi/menganalisis implementasi kebijakan model PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial.
- d. Mengembangkan model implementasi kebijakan PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang *implementasi kebijakan model Pendidikan Sistem Ganda bidang keahlian Pekerjaan Sosial* dan menjadi wacana kajian untuk mengembangkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan program keahlian pekerjaan sosial, baik di SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, dan SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung maupun di SMK lain yang sejenis dalam kerangka implementasi PSG dengan berstandar nasional sesuai PP 19/2005.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi para pihak, baik perorangan maupun lembaga SMKN 15 Bandung, SMKN 28 DKI Jakarta, SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung, dan lembaga terkait dengannya, untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengembangkan program selanjutnya dalam model penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, tepat dan

relevan. Kemudian dapat pula dijadikan sebagai umpan balik bagi para pengambil kebijakan strategis di bidang pendidikan kejuruan untuk mereorientasi dan memodifikasi pengembangan model seterusnya.

E. Paradigma Penelitian

Memasuki milenium ketiga dengan terbukanya pasar global dan perdagangan bebas, membawa implikasi pada tuntutan akan peningkatan mutu pengelolaan SMK sebagai produsen tenaga kerja yang terampil dan layak dipasarkan. Pengelolaan SMK yang profesional perlu terprogram dan terencana, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat diukur dan dievaluasi. Selama 10 tahun terakhir pemerintah sangat *concern* pada kemajuan dan mutu pendidikan menengah kejuruan. Melalui beberapa kebijakan seperti: pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan bagi SMK swasta, pemerintah menunjukkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan. Mutu dan pengelolaan SMK mulai diperhatikan dan ditangani secara profesional, berbeda dengan sebelumnya. Perubahan paradigma pengelolaan SMK ini sangat mengembirakan dan sekaligus memberikan harapan akan munculnya SMK-SMK yang unggul dan bermutu, baik dalam pengelolaan sekolahnya maupun lulusannya. Unggul berarti mampu bersaing dan memiliki daya tawar tinggi, bermutu berarti memiliki kompetensi dan posisi tawar tinggi.

Dalam rangka melahirkan tamatan yang unggul dan bermutu, mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang layak, pemilihan model pendidikan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilannya. Untuk itu kebijakan *Link and Match*

bagi sekolah kejuruan merupakan pilihan tepat yang tak tertolak lagi. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan sebaik-baiknya. Keterkaitan dan kesepadanan antara sekolah dengan DU/DI yang ada dalam *trek* kejuruan yang sama memiliki pengaruh kuat terhadap lahirnya lulusan bermutu dan unggul. Oleh karenanya implementasi kebijakan pemerintah ini memiliki urgensi yang sangat kuat untuk dilaksanakan terus sebaik-baiknya secara profesional pula. Tanpa keinginan kuat para pelaksana di lapangan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh dan profesional, maka kebijakan *Link and Match* tersebut hanya akan menjadi *macan kertas* yang hanya memiliki kekuatan di atas meja saja. PSG, dengan pendekatan terakhir yang menerapkan model *Project Work* sebagai tugas akhir untuk Uji Kompetensi siswa dalam Praktek Kerja Industri (Prakerin), merupakan strategi implementatif bagi kebijakan tersebut pada tingkat sekolah.

Ketercapaian tujuan sekolah dicerminkan oleh performa sekolah yang kondusif terhadap terciptanya kegiatan belajar mengajar yang dibanggakan oleh siswa. Adanya upaya pendidik dan tenaga kependidikan yang maksimal dalam pengelolaan sekolah disertai dengan adanya kepuasan batin yang seimbang, mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian tingkat keberhasilan tamatan yang bermutu dan unggul, antara lain memperoleh Nilai Ujian Akhir siswa yang memuaskan dan para tamatan dapat bekerja pada lembaga yang terkait dan sepadan dengan kompetensinya atau mandiri menjadi praktisi. Organisasi dan manajemen sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan menengah kejuruan dan mampu mewedahi kepentingan PSG selaras dengan visi dan misi yang hendak dicapai.

Kurikulum SMK Edisi 1999 yang berdasarkan prinsip *Broad-Based Curriculum, Competency Based Curriculum, Mastery Learning, Dual Based Program, dan Perkuatan Kemampuan Daya Suai dan kemandirian tamatan*, yang telah disempurnakan dengan Kurikulum 2004 sebagai kurikulum implementatif, pengimplementasiannya bersifat fleksibel, terbuka terhadap berbagai upaya penyempurnaan dan berorientasi kepada kebutuhan pemakai tamatan (*demand_driven*). Dengan kebijakan *Link and Match* dan strategi pelaksanaannya PSG yang operasionalnya ditandai dengan adanya kerja sama antara sekolah dan DU/DI melalui Majelis Sekolah, SMK yang bermutu dan unggul termasuk tamatannya berupaya diwujudkan. Tenaga kependidikan mulai kepala sekolah sampai penjaga sekolah secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pendidikan SMK, sehingga diperlukan pemahaman dan komitmen yang sama terhadap visi dan misi SMK serta memiliki kemampuan standar yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan peran dan fungsinya melalui pengelolaan berbasis kebutuhan nyata-dirasakan. Kontinuitas dan integritas upaya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang terprogram baik diperlukan untuk mendukungnya.

Pembinaan kesiswaan pada SMK dilakukan sejak penerimaan siswa baru sampai penelusuran tamatan. Kegiatan ini memerlukan proses yang sistematis dalam pengelolaannya, yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu. Sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pendidikan, berinisiatif, inovatif, kreatif dan produktif, mampu mengembangkan minat pada kegiatan ekstra kurikuler untuk memperoleh kemampuan tambahan yang dapat menunjang

kompetensi pokoknya. Untuk mendukung itu perlu fasilitas standar yang dapat memenuhi kebutuhan minimum pengembangan diri siswa. Penyediaan sarana yang belum ada mutlak diperlukan. Memelihara sarana yang sudah ada juga menjadi keharusan. Dan itu memerlukan keterlibatan setiap unsur terkait di sekolah. Didukung pula oleh lingkungan sekolah yang memadai, mulai kondisi fisik dan sosio-psikologisnya. Kondisi lingkungan sekolah yang kondusif memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan dapat memotivasi warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah.

Hubungan kerja sama sekolah dengan DU/DI merupakan realisasi dari kebijakan *Link and Match* yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hubungan kerja sama sekolah dengan DU/DI melalui berbagai kegiatan yang melibatkan DU/DI seperti: Praktek Kerja Industri (Prakerin), Project Work, Uji Kompetensi, Guru magang di Industri (*On The Job Training*) dan kerja sama Unit Produksi melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemantapan Unit Produksi yang merupakan etalase sekolah memerlukan pengelolaan secara profesional dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang memadai. Pendayagunaan Unit Produksi merupakan jalan terbaik untuk memberikan gambaran nyata pelaksanaan PSG sebagai implementasi strategis kebijakan *Link and Match*. Unit Produksi disamping sebagai laboratorium praktek yang bersifat akademis, juga bisa menjadi wadah operasional PSG.

Paparan di atas merupakan kondisi ideal yang menjadi cita-cita keberhasilan pelaksanaan PSG di SMK dan merupakan paradigma baru dalam lingkungan

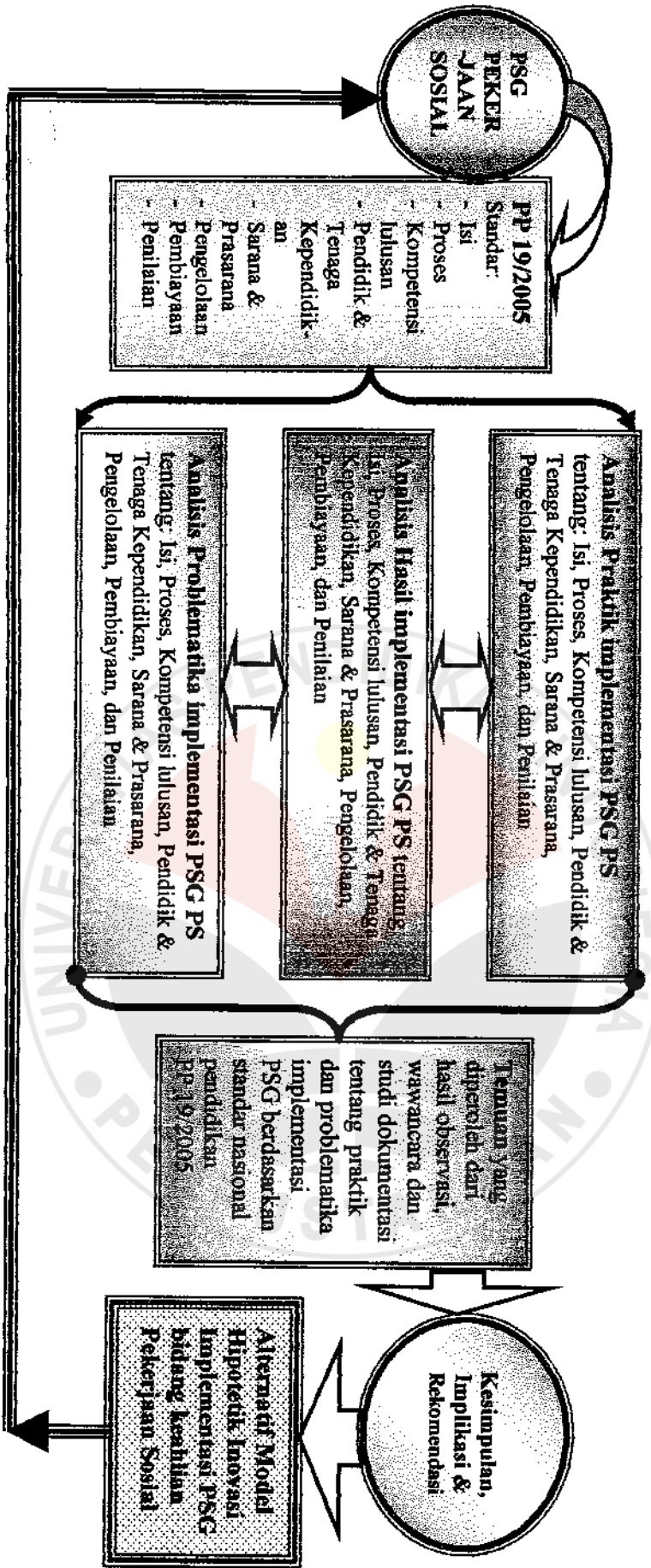
pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi ideal itu memerlukan pilihan model penyelenggaraan pendidikan yang tepat dan relevan, baik relevan dengan program keahlian SMK itu sendiri maupun relevan dengan kondisi nyata dunia kerja dan tantangan perubahan sosial masyarakat yang ada. Pemilihan model pendidikan ini akan secara signifikan mempengaruhi derajat ketercapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Paling tidak, memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakui pengguna lulusan.

Standar penyelenggaraan pendidikan secara nasional kini telah memiliki rujukan atau payung hukum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Standar nasional pendidikan tersebut adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara substansial, standar penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam PP no 19 tersebut meliputi delapan aspek utama penyelenggaraan pendidikan. Kedelapan aspek tersebut adalah: 1) *standar isi*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2) *standar proses*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 3) *standar kompetensi lulusan*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus; 4) *standar pendidik dan tenaga kependidikan*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik

dan tenaga kependidikan; 5) *standar sarana dan prasarana*, yaitu standar pendidikan yang berkaitan dengan prasyarat minimal tentang fasilitas yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 6) *standar pengelolaan*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapati efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; 7) *standar pembiayaan*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan; dan 8) *standar penilaian pendidikan*, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan alat penilaian pendidikan.

Asumsi terpapar di atas menghantarkan penulis pada logika berpikir yang mengarahkan pada paradigma penelitian dalam kerangka berikut:

PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 1: Paradigma Penelitian

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda deskriptif analitik. Dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi kesempurnaan data, dilakukan observasi, wawancara spontan dan terprogram, dan studi dokumentasi. Responden dipilih secara acak namun bertujuan.

Informasi yang telah diperoleh selama penggalian data langsung diolah sesuai kebutuhan dan urgensinya. Sesuai kebutuhan, bila data sudah dapat diklasifikasi secara langsung maka langkah ini dilakukan langsung, bila sudah cukup untuk dikategorisasikan maka langkah ini pun dilakukan langsung, begitu pula bila sudah layak divisualisasikan maka segera saat itu juga divisualisasikan, dan juga kalau memungkinkan ditarik inferensi segera diinferensikan juga. Tetapi guna menyempurnakan kesahihan pengolahan data, disediakan waktu khusus pada 4 bulan terakhir untuk melakukan kegiatan pengolahan ini secara mendalam sehingga sampai pada inferensi yang lengkap dan mendekati sempurna.

G. Lokasi dan Partisipan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi SMK Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial yang tersebar di tiga propinsi. Masing-masing dipilih dengan anggapan mewakili tingkat keberhasilan sekolahnya, yakni sekolah yang tergolong maju, sedang-sedang saja, dan kurang maju. Ketiga sekolah itu adalah:

1. SMKN 28 DKI Jakarta Jalan Maritim 26 Cilandak Barat Jakarta Selatan
2. SMKN 15 Jalan Gatot Subroto no.4 Bandung Jawa Barat, dan
3. SMKN 3 Terbanggi Besar di Jalan Ahmad Yani No.2 Poncowati Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu awal September 2005 sampai akhir Februari 2006. Namun demikian, untuk kepentingan penyempurnaan penelitian ini, setelah Februari 2006 masih terus dilakukan kontak dengan para pihak yang menjadi *contact person* di ketiga SMK tersebut.

Sumber data selain berupa dokumentasi juga beberapa warga sekolah terutama yang ada kaitannya dengan pelaksanaan PSG. Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi nara sumber pertama Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab sekolah secara keseluruhan; kemudian para pembantu kepala sekolah; penanggung jawab bidang garapan khusus dengan alasan mereka menguasai bidang garapannya masing-masing; guru mata pelajaran kejuruan; selanjutnya perwakilan siswa; kemudian alumni yang mewakili berbagai kelompok seperti dalam Tabel 1 dan Tabel 2; pengurus Komite Sekolah dan Majelis Sekolah yang mewakili beberapa setting DU/DI secara bervariasi; dan Pengurus Asosiasi Pekerja Sosial. Penggalan data dilakukan dengan cara yang lebih spontan dan dalam situasi-situasi yang rileks untuk menjaga kesahihan data yang diperoleh dan agar tidak terkesan menanyai sehingga data yang diperoleh betul-betul sahih. Mereka semua dipilih sebagai partisipan penelitian karena penulis menganggap mereka cukup mewakili berbagai komponen sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan PSG tersebut.

H. Sistematika Laporan

Desertasi ini disusun dalam enam Bab. Bab I memuat pendahuluan, Bab II menguraikan kajian pustaka, Bab III berisi uraian tentang metode penelitian, Bab IV menjelaskan hasil penelitian, Bab V mengemukakan pembahasan hasil penelitian dan pengembangan model implementasi PSG, dan Bab VI mengemukakan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bagian akhir, desertasi ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

